



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE- 01 /PJ/2021**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUBUHAN  
CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI**

- Yth. 1. Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;  
2. Kepala Kantor Wilayah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan  
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- A. Umum  
Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai yang Terutang atas Dokumen Berupa Cek dan Bilyet Giro, perlu diberikan petunjuk pelaksanaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
- B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud  
Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai pada cek dan/atau bilyet giro.
  2. Tujuan  
Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan keseragaman pelaksanaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai pada cek dan/atau bilyet giro.
- C. Ruang Lingkup  
Ruang lingkup dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi:
1. penelitian permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai;
  2. pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai; dan
  3. bentuk cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
- D. Dasar
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
  2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai yang Terutang atas Dokumen Berupa Cek dan Bilyet Giro.

## E. Materi

1. Penelitian Permintaan Pembubuhan Cap Bukti Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai
  - a. Permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai dilakukan dalam hal terdapat pembayaran selisih kurang Bea Meterai yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak.
  - b. Permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan dengan menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pihak yang mengajukan permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai diadministrasikan atau Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
  - c. Permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diajukan oleh:
    - 1) nasabah yang menerbitkan cek dan/atau bilyet giro;
    - 2) bank penyedia cek dan/atau bilyet giro; atau
    - 3) pembawa cek dan/atau bilyet giro.
  - d. Atas permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) memberikan formulir permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini, untuk diisi oleh pihak yang mengajukan permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
  - e. Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang telah diisi diserahkan kepada Petugas TPT dilampiri dengan:
    - 1) cek dan/atau bilyet giro yang akan dibubuhi cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai; dan
    - 2) SSP yang telah mendapatkan NTPN.
  - f. Petugas TPT memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada pihak yang mengajukan permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai dalam hal permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan meneruskan permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai kepada Kepala Seksi Pelayanan.
  - g. Dalam hal kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak terpenuhi, permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai dikembalikan kepada pihak yang mengajukan permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
  - h. Setelah permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai diterima lengkap, Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk memastikan:
    - 1) kebenaran SSP yang telah mendapatkan NTPN melalui konfirmasi NTPN pada sistem informasi yang tersedia;
    - 2) kesesuaian nilai pembayaran dalam SSP yang telah mendapatkan NTPN dengan jumlah selisih kurang Bea Meterai yang harus dilunasi;
    - 3) kesesuaian keterangan nomor seri cek dan/atau bilyet giro yang tercantum dalam SSP dengan nomor seri cek dan/atau bilyet giro yang dimintakan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai; dan
    - 4) kesesuaian kode akun pajak dan kode jenis setoran, yaitu kode akun pajak 411611 dan kode jenis setoran 100.

- i. Dalam hal kebenaran/kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf h terpenuhi:
    - 1) Pelaksana Seksi Pelayanan membubuhkan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai pada sisi muka cek dan/atau bilyet giro;
    - 2) Kepala Seksi Pelayanan membubuhkan tanda tangan, nama terang, dan cap Kantor Pelayanan Pajak pada sisi belakang cek dan/atau bilyet giro; dan
    - 3) Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mengembalikan cek dan/atau bilyet giro yang telah dibubuhi cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai, tanda tangan, nama terang, dan cap Kantor Pelayanan Pajak kepada pihak yang mengajukan permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
  - j. Dalam hal kebenaran/kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf h tidak terpenuhi, Pelaksana Seksi Pelayanan mengembalikan permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada pihak yang mengajukan permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
  - k. Dalam rangka pengadministrasian dan pengawasan, Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencatatan atas pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai yang telah dilaksanakan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
2. Pembubuhan Cap Bukti Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai
- a. Cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai dibubuhkan pada sisi muka cek atau bilyet giro.
  - b. Cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai dibubuhkan sedemikian rupa sehingga tidak menutupi atau menimpa unsur atau informasi utama yang telah tercantum dalam cek atau bilyet giro, khususnya unsur *Magnetic Ink Character Recognition (MICR)*.
3. Bentuk Cap Bukti Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai
- a. Cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai paling sedikit memiliki unsur-unsur:
    - 1) tulisan "BEA METERAI LUNAS"; dan
    - 2) tulisan nominal selisih kurang Bea Meterai.
  - b. Ukuran cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai disesuaikan dengan ukuran cek dan/atau bilyet giro.
  - c. Format cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai adalah sebagai berikut.



Ukuran: - lebar maksimal 1 cm  
- panjang maksimal 3 cm

F. Penutup

Dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai berpedoman pada Surat Edaran ini.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL,



*h* SURYO UTOMO *h*

LAMPIRAN

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-01/PJ/2021

Tanggal : 8 Januari 2021

A. CONTOH FORMAT FORMULIR PERMINTAAN PEMBUBUHAN CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI

.....(1)
.....(2) Hal : Permintaan Pembubuhan Cap Bukti Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai pada Cek dan/atau Bilyet Giro
Yth. Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (3)
Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-01/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai yang Terutang atas Dokumen Berupa Cek dan Bilyet Giro, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ..... (4) NPWP/NIK : ..... (5) meminta pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai pada cek dan/atau bilyet giro dengan jumlah ..... (6) lembar dan telah kami lunasi dengan surat setoran pajak atau kode <i>billing</i> dengan NTPN .....(7)
Demikian permintaan ini disampaikan.
Hormat kami,  ..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMINTAAN  
PEMBUBUHAN CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI PADA CEK  
DAN/ATAU BILYET GIRO

- Angka 1 : diisi dengan kepala surat (jika ada).
- Angka 2 : diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat.
- Angka 3 : diisi dengan tujuan surat yaitu Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala KPP tempat mengajukan permintaan.
- Angka 4 : diisi dengan nama pihak yang mengajukan permintaan.
- Angka 5 : diisi dengan NPWP/NIK pihak yang mengajukan permintaan.
- Angka 6 : diisi dengan jumlah lembar cek dan/atau bilyet giro yang diminta pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
- Angka 7 : diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang terdapat pada surat setoran pajak.
- Angka 8 : diisi dengan tanda tangan dan nama pihak yang mengajukan permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.

B. CONTOH FORMAT DAFTAR PEMBUBUHAN CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI

Daftar Pembubuhan Cap Bukti Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai

No	Pemohon	Dokumen Warkat			Tanggal Permintaan	Surat Setoran Pajak		Keterangan
		Jenis	Jumlah Lembar	Nomor Seri		NTPN	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PEMBUBUHAN CAP BUKTI PELUNASAN  
SELISIH KURANG BEA METERAI

- Angka 1 : diisi dengan nomor urut.
- Angka 2 : diisi dengan identitas pemohon.
- Angka 3 : diisi dengan jenis dokumen warkat yang diajukan permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
- Angka 4 : diisi dengan jumlah lembar dokumen warkat yang diajukan permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
- Angka 5 : diisi dengan nomor seri dokumen warkat yang diajukan permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
- Angka 6 : diisi dengan tanggal pengajuan permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
- Angka 7 : diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang terdapat pada surat setoran pajak.
- Angka 8 : diisi dengan nilai yang terdapat pada surat setoran pajak.
- Angka 9 : diisi dengan keterangan.

DIREKTUR JENDERAL,



SURYO UTOMO